

## Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis

Eko Wibowo<sup>1\*</sup>, R. Widodo Triputro<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

<sup>1\*</sup> email korespondensi: Emailku8605@gmail.com

**Citation:**

Wibowo, E., & Triputro, R. W. (2022). Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1). Pemerintahan Desa, 3(1), 54- 73.  
doi: Prefix [10.32669](https://doi.org/10.32669)

Editor: Junior Hendri Wijaya

Received: 10 Februari 2022

Accepted: 14 Maret 2022

Published: 24 Maret 2022



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat sehingga menimbulkan rasa tenang dan damai. Sinergitas 3 Pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden sangat berpengaruh dalam upaya pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. 3 Pilar Kalurahan terdiri dari Lurah, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh 3 Pilar Kalurahan dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat sudah terjalin dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan terutama dengan ketidakpuasan tokoh masyarakat atas kinerja dari unsur 3 Pilar Kalurahan di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden tersebut.

**Kata kunci:** sinergitas; keamanan; ketertiban.

**Abstract:** A conducive security and order situation is highly expected by the whole community in order to create a sense of peace and tranquility. The synergy of the 3 Pillars of the Sanden is very influential in community development efforts to create peace and order in society situation. The 3 Pillars of the Sanden Village consist of the Srigading Village Head, Bhabinkamtibmas, and Babinsa. The research method used is a qualitative approach, which uses data collection techniques in the form of interviews with resource persons. The results showed that the communication and coordination built by the 3 Pillars in fostering public security and order had been well established. However, there are still some obstacles faced in carrying out tasks in the field, especially with the dissatisfaction of community leaders over the performance of the elements of the 3 Pillars.

**Keywords:** synergy; security; order.

---

## 1. Pembahasan

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Menurut Rinawani dan Mayarni (2018) keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan.

Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam atau penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Unsur pemerintahan terbawah dalam pembinaan dan ketertiban masyarakat adalah kalurahan. Kalurahan yang dipimpin oleh seorang lurah memiliki tugas tanggung jawab dalam pembinaan Kamtibmas sesuai yang tercantum dalam UU maupun peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 yang menyatakan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Pemerintah Kalurahan dalam mengemban tugas pembinaan dan ketertiban masyarakat tidak dapat berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari institusi lain yang mampu tugas pembinaan keamanan dan ketertiban yaitu Koramil Sanden yang diwakili oleh Babinsa serta dari Polsek Sanden yang diwakili oleh Bhabinkamtibmas. 3 unsur tersebut yang kemudian disebut dengan 3 Pilar Kalurahan.

Kerjasama 3 Pilar Kalurahan tidak serta merta dapat menurunkan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka gangguan Kamtibmas dan angka kriminal di wilayah salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden. Babinsa yang telah terbentuk sejak tahun 1967 dan Bhabinkamtibmas yang sudah ada sejak 2004 mendampingi dan bekerjasama dengan lurah pada

---

kenyataanya masih kesulitan dalam membina keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Upaya menyinergikan peran ketiga pilar tersebut maka harus memegang beberapa prinsip yang harus dilaksanakan secara bersama-sama yaitu komunikasi intensif, transparansi, sinergi yang harmonis, kesetaraan dalam penyelesaian masalah, komitmen mewujudkan kamtibmas dan membangun kemitraan.

Terdapat indikasi bahwa sinergitas 3 pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden berjalan kurang baik sebagai contoh dalam proses perumusan perencanaan pembangunan kalurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas kurang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan khususnya dalam bidang pembinaan kemasyarakatan. Sehingga dalam proses pembinaan cenderung berjalan sendiri sesuai program dari masing – masing institusi tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sinergitas 3 pilar salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Selain itu menurut peneliti bahwa dengan penelitian kualitatif akan mendapatkan data yang lengkap dan dimungkinkan

mendapatkan temuan informasi yang baru, penting, serta dapat bermanfaat dalam menentukan langkah penelitian berikutnya.

Subyek penelitian adalah pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Subyek penelitian bisa juga disebut dengan informan. Subyek atau informan dalam penelitian ini adalah Komandan Rayon Militer (Danramil) Sanden, Bintara Pembina Desa Komando Rayon Militer (Babinsa Koramil) Sanden, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sanden, Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Sektor (Bhabinkamtibmas Polsek) Sanden, Lurah, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden, dan masyarakat.

Selanjutnya dilaksanakan kegiatan wawancara dengan narasumber, dokumentasi kegiatan penelitian, yang dilanjutkan dengan analisa data untuk mempermudah pemahaman dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan Analisis terdiri dari tiga alur kegiatanyang terjadi yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dilanjutkan

dengan saran penulis kepada 3 Pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden, dan masyarakat.

### **3. Data dan Pembahasan**

- (1. Bentuk sinergitas 3 pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden, dan masyarakat dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
  - a. Komunikasi dan koordinasi 3 pilar kalurahan dengan unsur tokoh masyarakat.

Dari informasi yang disampaikan oleh narasumber dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi 3 pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden, dan masyarakat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat belum berjalan dengan baik. Apalagi pejabat Lurah yang baru masih memerlukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja yang baru. Proses pendekatan dengan masyarakat juga memerlukan waktu dan proses yang tidak sebentar.

Narasumber menyampaikan keterangan kepada peneliti tentang kekurangan komunikasi 3 Pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden dengan masyarakat diantaranya adalah:

- a) Adanya pejabat Lurah yang baru menyebabkan perubahan sistem komunikasi pemerintahan. Perbedaan gaya pemerintahan dan cara berkomunikasi dengan masyarakat pasti akan terjadi. Penyesuaian memerlukan waktu sehingga komunikasi untuk pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan mengalami kendala.

- 
- b) Komunikasi yang terjalin antara Babinsa, Bhabinkamtibmas dengan Linmas sebagai unsur pengamanan yang ada di bawah naungan Pemerintah Kalurahan di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden, dan masyarakat masih kurang. Kurangnya komunikasi antar unsur pembina keamanan dan ketertiban masyarakat menyebabkan proses Kamtibmas yang kondusif akan terhambat.
- c) Harapan dari tokoh masyarakat kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk berperan aktif dalam kegiatan kebencanaan baik Covid 19 maupun bencana alam. Saat ini dari informasi narasumber menyatakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas terkesan hanya memenuhi tuntutan tugas yaitu pelaporan berupa foto kegiatan.
- d) Adanya temuan fakta bahwa terdapat unsur lain selain 3 Pilar Kalurahan yang berkompeten dalam hal pembinaan Kamtibmas di di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden, dan masyarakat yaitu Babinpotmar TNI AL serta Polairud. Komunikasi yang baik justru terjalin dengan Babinpotmar yaitu personil TNI AL serta personil Polairud yaitu Polisi Perairan dan Udara yang memiliki pos di sekitar Pantai Samas. Padahal Babinpotmar maupun Polairud bukan merupakan unsur 3 pilar yang membina keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden.
- b. Koordinasi dalam identifikasi berbagai permasalahan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lurah, jogoboyo, Babinsa, maupun Bhabinkamtibmas selalu berkoordinasi dalam membahas permasalahan gangguan kamtibmas yang ada di di salah satu kalurahan

---

wilayah Kapanewon Sanden. Gangguan Kamtibmas yang sering terjadi perlu segera di tangani, namun untuk menangani permasalahan tersebut perlu adanya dukungan dari semua unsur masyarakat serta dukungan dari pemerintah kalurahan, kapanewon, sampai Pemerintah Daerah Bantul yang sampai saat ini belum terlaksana. Hal mendasari Pantai Samas sebagai pusat gangguan Kamtibmas di wilayah di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden adalah adanya tempat karaoke, minuman keras, dan praktek prostitusi.

- c. Koordinasi intensif dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Koordinasi intensif selalu dilaksanakan dengan unsur pemerintahan diluar pamong Kalurahan yaitu Babinsa, Bhabinkamtibma. Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan Linmas. Bentuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan Linmas adalah pemberian wawasan kebangsaan, pelatihan baris berbaris, serta pelatihan pengaturan lalu lintas. Kesbangpolinmas Kab. Bantul juga turut serta dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan pelatihan.

Kebencanaan juga merupakan faktor pendukung keamanan dan ketertiban. Kesiapsiagaan warga menghadapi bencana dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam bermasyarakat. Sehingga FPRB mengharapkan peran aktif dari unsur Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pamong kalurahan.

---

Kritikan diberikan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas karena jarang mengunjungi kegiatan yang dilaksanakan oleh Linmas. Ketua Pelaksana Linmas mengharapkan sambang dari Babinsa maupun Bhabinkamtibmas sebagai penyemangat dan memberikan dukungan moril dalam melaksanakan penjagaan keamanan dan ketertiban di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden.

- d. Koordinasi dan komunikasi intensif dalam penyelesaian berbagai masalah yang timbul akibat gangguan Kamtibmas.

Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sudah sering dilakukan oleh 3 Pilar kalurahan wilayah Kapanewon Sanden. Namun adanya obyek wisata Pantai Samas yang terdapat lokasi karaoke, miras, dan prostitusi selalu menjadi penyumbang angka gangguan Kamtibmas tertinggi. Upaya seluruh elemen yang ada tidak akan ada artinya apabila karaoke, miras, dan prostitusi tersebut tidak diberantas.

Dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh fakta bahwa masih ada keluhan dari masyarakat terkait penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh 3 Pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden utamanya penyelesaian masalah oleh Bhabinkamtibmas. koordinasi antara Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas hanya terjadi saat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Dan ketika situasi aman maka 3 Pilar Kalurahan tersebut tidak ada koordinasi terkait upaya pencegahan gangguan Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas hadir hanya ketika terdapat keributan atau gangguan Kamtibmas. Mengajak pamong kalurahan utamanya Dukuh sebagai pemilik wilayah untuk

berkoordinasi dalam menyelesaikan keributan tersebut. Seharusnya koordinasi terkait upaya pencegahan gangguan Kamtibmas juga dilakukan sehingga menekan potensi gangguan yang mungkin terjadi.

- e. Koordinasi yang baik diantara 3 pilar dalam mengatasi atau mencegah berbagai kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diperoleh informasi bahwa koordinasi diantara 3 pilar dalam mengatasi atau mencegah berbagai kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas sudah dilaksanakan dengan sangat baik di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden. Linmas sebagai tangan kanan Lurah dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat Kalurahan sudah dilaksanakan yaitu dengan adanya piket Linmas di Balai Kalurahan, patroli, serta sambang poskamling, Kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian dan TNI diantaranya penyuluhan narkoba, penyuluhan tentang kenakalan remaja, sambang kamling dengan selalu berkoordinasi dan bersama – sama dengan unsur pamong kalurahan.

2. Faktor pendukung dan penghambat sinergitas 3 pilar Kalurahan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
  - a. Membangun kemitraan yang setara diantara berbagai pengampu kepentingan Kamtibmas di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden.

Kemitraan yang dibangun antar pengampu kepentingan kamanan dan ketertiban masyarakat yaitu Lurah, Babinsa,

dan Bhabinkamtibmas sudah berjalan dengan baik. Namun dalam hal penanganan permasalahan yang ada di masyarakat terhambat oleh tugas dari masing – masing instansi. Selain dengan lurah dan Bhabinkamtibmas, koordinasi juga dilakukan dengan Babinpotmar Pos AL Samas dan Polair Samas dalam menjaga dan membina Kamtibmas.

Komunikasi sosial (Komsos) merupakan salah satu cara mewujudkan kebersamaan seorang Babinsa membangun keakraban dengan warga binaan guna menciptakan interaksi dan kekompakan di masyarakat. Komsos yang dilakukan merupakan cerminan kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya Babinsa kepada warga binaannya dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan situasi di wilayah. Karena itu, selaku Babinsa harus peduli dan peka dengan situasi yang ada di sekitar sehingga setiap ada permasalahan apapun bisa diselesaikan dengan baik.

Hal yang menonjol kaitan dengan Kamtibmas yang ada di wilayah di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden adalah area pantai sehingga sharing dan informasi dini terkait perkembangan Kamtibmas yang ada sangat diperlukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan kewan dan ketertiban yang ada. Kemitraan saat menjabat Lurah g sangat dekat. Jam berapapun Babinsa dan Bhabinkamtibmas menghubungi ketika terjadi gangguan Kamtibmas maka akan direspon dengan cepat. Serta mengetahui kelebihan dan kelemahan masing – masing sehingga di lapangan dapat saling mengisi.

Bentuk kemitraan yang dilakukan 3 Pilar Kalurahan di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden antara lain persamaan persepsi dan interpretasi terhadap hal-hal yang menonjol di bidang kamtibmas dan sharing informasi untuk saling memahami kekurangan dan kelemahan dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual yang terkait dengan penanggulangan gangguan Kamtibmas. Kemitraan 3 Pilar Kalurahan berjalan dengan sangat baik, hal ini karena kemitraan antar instansi pengampu fungsi Kamtibmas dengan masyarakat terjalin melalui komunikasi yang dilakukan dengan sangat baik dan terbuka, disisi lain hubungan ini sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak, warga masyarakat menyerahkan kepercayaan penanganan gangguan Kamtibmas kepada pihak yang berwenang.

- b. Komitmen bersama mengenai permasalahan gangguan Kamtibmas oleh 3 Pilar Kalurahan.

Situasi Kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah. Persepsi pengambilan keputusan tentang gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat harus dapat dikomunikasikan oleh 3 Pilar Kalurahan dengan tokoh masyarakat setempat dan harus dapat diselesaikan dengan adil, tepat, dan tuntas.

---

Tiga pilar di pemerintahan kalurahan yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah harus bersinergi dalam mendeteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi peran tiga pilar itu memiliki dasar hukum kuat yakni di Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang Desa.

Untuk itu, dalam mensinergikan peran ketiga pilar tersebut maka harus memegang beberapa prinsip yang harus dilaksanakan secara bersama-sama yaitu komunikasi intensif, transparansi, sinergi yang harmonis, kesetaraan dalam penyelesaian masalah, komitmen mewujudkan kamtibmas dan membangun kemitraan.

- c. Kendala yang dihadapi 3 pilar kalurahan dalam komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat.

Dari hasil wawancara didapatkan fakta bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi oleh 3 Pilar Kalurahan di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kendala tersebut diantaranya adalah:

- a) Lurah Kalurahan yang baru saja menjabat masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Komunikasi yang dibangun dengan pengampu pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat masih dibangun baik dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun dengan tokoh masyarakat. Adanya pemilihan lurah yang telah lalu sedikit banyak menghambat proses

---

komunikasi dengan tokoh maupun masyarakat terutama dengan masyarakat yang pada saat pemilihan bukan simpatisan lurah terpilih.

- b) Banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh personil Koramil Sanden yang terbatas menyebabkan tidak maksimalnya peran Babinsa yang ada di Kalurahan. Babinsa masih memiliki tugas lain misalnya kegiatan Kodim Bantul, Korem Yogyakarta, TMMD, serta kegiatan lain yang diperintahkan oleh pimpinan di atasnya.
- c) Penugasan ganda yang didapat oleh Bhabinkamtibmas menyebabkan kurang maksimalnya peran Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas ganda tersebut diantaranya adalah sekolah kejuruan, pelatihan baik di Polres Bantul maupun Polda DIY. Selain melaksanakan tugas pokok sebagai Bhabinkamtibmas yaitu melakukan pengawasan, pembinaan, pemeliharaan dan pelatihan terhadap masyarakat binaannya para Bhabinkamtibmas ini masih dilibatkan dengan tugas-tugas lain untuk melakukan pengamanan-pengamanan kegiatan masyarakat, pelatihan pengendalian masa, pengamanan unjuk rasa, patroli zona, pengamanan kegiatan-kegiatan keolah ragaan sertakegiatan kegiatan lain yang berhubungan atau relevan dengan tugas umum kepolisian. Sehingga hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi tugas pokok Bhabinkamtibmas sebagai pemeliharaan kamtibmas, pengawasan, pembinaan dan pelatihan terhadap warganya tidak maksimal dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas tersebut,

- 
- d. Perumusan perencanaan pembangunan kalurahan khususnya dalam bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Keterlibatan TNI Polri dalam Musren merupakan salah satu peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program percepatan pembangunan di kalurahan utamanya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu sesuai tugas pokok TNI Polri yaitu membantu tugas pemerintah daerah sampai tingkat kalurahan, membantu pemerintah dalam bidang pembangunan kamtibmas yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Namun sampai dengan saat ini keterlibatan TNI Polri dalam penyusunan rencana pembangunan khususnya bidang keamanan dan ketertiban masyarakat masih terbatas, bisa dikatakan bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak memiliki hak untuk menyampaikan usulan dalam penyusunan pembangunan tersebut. Dan tidak ada aturan yang mengatur keterlibatan TNI Polri dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut saat kegiatan musyawarah kalurahan. TNI Polri yang diwakili oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah kalurahan saat berkomunikasi di luar kegiatan musyawarah. Atau bisa melalui masyarakat yang diundang saat kegiatan musyawarah tersebut. Namun usulan tersebut masih akan ditampung dan dipilah sesuai dengan anggaran yang ada serta sesuai dengan skala prioritas.

- e. Evaluasi program kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban

---

Kegiatan evaluasi terkait pembinaan Kamtibmas oleh unsur 3 Pilar Kalurahan salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden tidak pernah berjalan. Kegiatan evaluasi hanya dilaksanakan secara intern masing – masing institusi yang berkepentingan di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seharusnya dengan adanya evaluasi pelaksanaan tugas dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan program prioritas Kamtibmas di tahun yang akan datang. Apabila rapat evaluasi dapat dilaksanakan maka dapat secara jelas terlihat progres apa yang telah dicapai oleh Kalurahan Srigading dalam bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Evaluasi kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat belum berjalan optimal, ditunjukkan dengan peningkatan Laporan Polisi yang masuk di Polsek Sanden sebagai imbas dari gangguan Kamtibmas yang terjadi. Kinerja 3 Pilar Kalurahan belum dapat meminimalisir atau mengurangi angka gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Kegiatan evaluasi sinergitas 3 Pilar Kalurahan harus rutin digelar dan berjalan konsisten serta berkesinambungan, dalam menciptakan rasa aman ditengah masyarakatnya di wilayah salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden serta mengajak masyarakat untuk kerja sama dan berperan aktif dalam memberikan informasi penting dalam situasi yang berkembang diwilayah. Masyarakat bisa mengajak kepada masyarakat lainnya untuk berpartisipasi aktif menjaga lingkungannya, sehingga akan terciptanya rasa aman dan kondusif dan supaya terjalin keakraban antara

---

masyarakat dengan 3 Pilar Kalurahan Srigading, serta masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang positif kepada pemerintah terutama kepada pemerintah Kalurahan Srigading demi kemajuan kamtibmas di Srigading.

#### **4. Kesimpulan**

Sinergitas 3 Pilar Kalurahan di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting dan bermanfaat bagi terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian, peneliti mendapatkan data bahwa komunikasi dan koordinasi antara unsur 3 Pilar Kalurahan yaitu Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan.

Sebelum membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sinergitas 3 Pilar Kalurahan, terdapat temuan fakta bahwa ada unsur lain selain 3 Pilar Kalurahan yang berkompeten dalam hal pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah yaitu Babinpotmar (Bintara Pembina Potensi Maritim) TNI AL yang bermarkas di Pos AL Samas serta Sat Polairud (Satuan Kepolisian Perairan dan Udara) Polres Bantul yang bermarkas di Pantai Samas. Padahal personil Babinpotmar maupun Polairud bukan merupakan unsur 3 pilar yang membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun dalam faktanya masyarakat wilayah di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden khususnya wilayah pantai lebih dekat dan komunikatif dengan 2 satuan tersebut.

Kelebihan yang terdapat dalam sinergitas 3 Pilar Kalurahan adalah telah berjalannya komunikasi dan koordinasi antara ketiga unsur tersebut yaitu Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Hal itu ditunjukkan dengan adanya data dari narasumber yang menyatakan bahwa 3 Pilar Kalurahan selalu melaksanakan kegiatan komunikasi dan koordinasi.

Kelebihan selanjutnya adalah ketiga pilar tersebut memegang beberapa prinsip yang dilaksanakan secara bersama-sama yaitu komunikasi intensif, transparansi, sinergi yang harmonis, kesetaraan dalam penyelesaian masalah, komitmen mewujudkan kamtibmas dan membangun kemitraan. Hal tersebut diungkapkan oleh ketiga unsur pilar Kalurahan dengan didukung oleh pendapat dari beberapa unsur pamong kalurahan.

Namun dalam pelaksanaan membina keamanan dan ketertiban masyarakat 3 Pilar Kalurahan di wilayah salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden masih mendapat beberapa kendala sehingga perlu dilakukan suatu upaya yang efektif dalam mengatasi kendala tersebut. Narasumber menyampaikan keterangan kepada peneliti tentang kekurangan sinergitas 3 Pilar Kalurahan diantaranya adalah:

Adanya pejabat Lurah yang baru menyebabkan perubahan sistem komunikasi pemerintahan. Perbedaan gaya pemerintahan dan cara berkomunikasi dengan masyarakat pasti akan terjadi. Penyesuaian memerlukan waktu sehingga komunikasi untuk pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan mengalami kendala.

Sinergi yang terjalin antara Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dengan Linmas, FPRB, Satgas Covid 19 sebagai unsur pendukung pemerintahan yang ada di bawah naungan pemerintah kalurahan masih kurang. Kurangnya komunikasi antar unsur pembina keamanan dan ketertiban masyarakat menyebabkan proses pembinaan masyarakat akan terhambat. Harapan dari tokoh masyarakat kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk berperan aktif dalam kegiatan kebencanaan baik Covid 19 maupun bencana alam. Saat ini dari informasi narasumber menyatakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas terkesan hanya memenuhi tuntutan tugas yaitu pelaporan berupa foto kegiatan.

Kurangnya pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam penyusunan rencana kerja kalurahan khususnya di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tidak adanya evaluasi kinerja pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah dilaksanakan oleh 3 Pilar Kalurahan di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden.

#### **5. Ucapan Terimakasih**

Penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini sehingga meluarkan artikel ini.

#### **6. Daftar Pustaka**

(LJ, Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Rahmawati, Triana et al. 2014. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah. Jurnal Administrasi Publik (JAP)

---

Rinawati, Maryani. 2018. Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. JOM FISIP Vol 5, Edisi II.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2007. Surat Keputusan Kasad nomor 98 tahun 2007 tentang Babinsa. Sekretariat Negara. Jakarta

Bakesbangpol DIY. 2021. Pengukuhan Jaga Warga Se- Daerah Istimewa Yogyakarta.  
(<http://kesbangpol.jogjaprov.go.id/berita/detail/61-pengukuhan-jaga-warga-se-daerah-istimewa-yogyakarta>) diakses 28 Mei 2021

Kurniasih, Dewi. 2011 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Bandung.  
(<http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/download/709/595>) diakses 27 Mei 2021

Pemerintah Indonesia. 2016. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.  
(<http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/peraturanmenteridalamnegerirepublikindonesianomor44tahun2016tentangkewenangandes>) diakses 28 Mei 2021